

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Amirudin, dkk, *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja Graffindo, Jakarta, 2008
- Aprianti, Rieya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata*, FH UI, Depok, 2012
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit*, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 2002.
- Ginting, Elyta R, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2007.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodology Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Marzuki, Peter M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, cet. 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, cet. II, Djamban, Jakarta, 2005
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Rasaid, M Nur, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Rasyid, Laila M, dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, Bandung, Alumni, 1999
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992

- Shubhan, M Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015
- Sulaiman, Robinton, dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Suparman, Eman, *Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2010
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295
- Makarao, Moh Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Syahrani, Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Wicaksana, Dio Ashar, dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, Cet. I, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2020
- Wijaya, Andika, dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

RV (*Reglement op de Rechtsvordering*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (Lembaran Negara Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297)

Perubahan Nomor 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN-Niaga.Jkt.Pst.

JURNAL ILMIAH

Andani, Devi, dan Wiwin Budi Pratiwi, *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 28 September 2021.

Dewi, Wulan W, dan I Made Tjattrayasa, *Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 5, n. 1, feb. 2016. ISSN 2303-0569. 2016.

Jazuri, M, dkk, *Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan (Studi Analaisis di Pengadilan Niaga Medan)*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 3, Agustus 2013.

Putriyanti, Erma D, and Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, no. 3, 2010.

Sari, Dinda A, dan Elvi Zahara, *Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil dari UU No 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (1) Juni 2018: 14 -21. Universitas Medan Area, Medan, 2018.

Sunarmi, Robert, dkk, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana*, USU Law Jurnal Vol. 4 No. 4, 2016

Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitanya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, 2014.

MEDIA ONLINE

Dharmadji, Antonius G, 2021, *Asas Nebis In Idem Tidak Berlaku Dalam PKPU*, <https://pdb-lawfirm.id/asas-nebis-in-idem-tidak-berlaku-dalam-pkpu/>,

Diakses pada 20 Februari 2023.

Hariyoto, Andrew N, 2022, *Penjelasan Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Serta Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, <https://bplawyers.co.id/2022/01/04/penjelasan-utang-yang-telah-jatuh-tempo-dan-dapat-ditagih-serta-pembuktian-sederhana-dalam-Kepailitan/>. diakses 30 November 2022

Rokhayah, Siti 11 Mei 2020, *Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html#:~:text=Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Perdata%20ada%20lah,pembuktian%20yang%20sempurna%20dan%20mengikat>, diakses 9 Oktober 2022.

Subhan, Hadi, 21 Februari 2022, *Kepailitan dan PKPU II Dr. M. Adi Subhan, S.H., M.H., C.N.*, <https://youtu.be/HbmKQIu0OgY>. Diakses 30 November 2022.

Syafnidawaty, 23 Oktober 2020, *Tujuan Penelitian*, <https://raharja.ac.id/2020/10/23/tujuan-penelitian/>, diakses 1 Desember 2022.